

INDIKATOR PENTING

Provinsi Papua

Edisi April 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

INDIKATOR
PENTING
Provinsi **Papua**

Edisi April 2022





©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI APRIL 2022

ISSN : 2477-4472
Katalog BPS : 1103009.94
No. Publikasi : 94550.2204

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Editor : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tata Letak : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2022
xvi + 63 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi April 2022

Pengarah :

Adriana Helena Carolina, SE., MM

Editor :

Priyo Yudyatmoko, S.ST, M.P.P.

Lia Pujialarasari, S.ST

Didik Sugeng Utomo, S.ST, M.Ec.Dev,

Penulis :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Pengolahan Data :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Penyiapan Draft :

Deny Riani Maghfiroh, S.ST

Headline



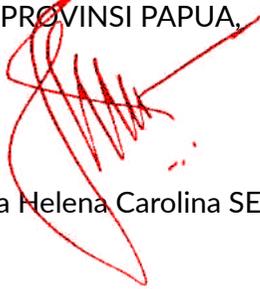
Kata Pengantar

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Impor, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan.

Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, April 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,


Adriana Helena Carolina SE, MM

Daftar Isi

vii	●	KATA PENGANTAR
ix	●	DAFTAR ISI
x	●	DAFTAR TABEL
xi	●	DAFTAR GAMBAR
xiii	●	RINGKASAN EKSEKUTIF
	—	
		SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
3	●	Penduduk
6	●	Kemiskinan
9	●	Ketimpangan
10	●	Indeks Demokrasi Indonesia
11	●	Ketenagakerjaan
13	●	Indeks Pembangunan Manusia
16	●	Indeks Kebahagiaan
18	●	Potensi Desa (PODES)
	—	
		EKONOMI DAN PERDAGANGAN
23	●	Inflasi (<i>update</i>)
25	●	Produk Domestik Regional Bruto
28	●	Ekspor (<i>update</i>)
30	●	Impor (<i>update</i>)
32	●	Nilai Tukar Petani (<i>update</i>)
35	●	Angkutan Laut (<i>update</i>)
37	●	Angkutan Udara (<i>update</i>)
39	●	Industri Manufaktur
41	●	Pola Distribusi Perdagangan
42	●	Pariwisata (<i>update</i>)
	—	
		PERTANIAN
47	●	Tanaman Pangan
	—	
51	●	PENJELASAN TEKNIS
57	●	LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua Maret 2014-September 2021 (rupiah)	8
Tabel 2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja serta Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua	12
Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2021	17
Tabel 4. Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan <i>Year on Year</i> Gabungan 3 Kota IHK di Papua	23
Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi <i>Year on Year</i> Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	24
Tabel 6. Laju Pertumbuhan dengan Pertambangan dan Penggalian dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	26
Tabel 7. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (persen)	27
Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Maret 2022*	28
Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Maret 2022*	30
Tabel 10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Januari-Maret 2022 (2018=100)	34
Tabel 11. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2022	35
Tabel 12. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2022	36
Tabel 13. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2022	37
Tabel 14. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2022	38
Tabel 15. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	40
Tabel 16. Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2020	41
Tabel 17. TPK dan RLTM Hotel Bintang di Papua, Februari 2022	42
Tabel 18. TPK dan RLTM Hotel Non Bintang di Papua, Februari 2022	43

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1980-2020	3
Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020	4
Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020 (orang)	5
Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2020 (orang)	5
Gambar 5. Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2014–September 2021	7
Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua Maret 2014-September 2021 (rupiah)	8
Gambar 7. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020	10
Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah	12
Gambar 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010–2021	14
Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2021	15
Gambar 11. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018	19
Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018	19
Gambar 13. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018	19
Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan III-2018–Triwulan IV-2021 (persen)	26
Gambar 15. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Maret 2022* (Juta US\$)	29
Gambar 16. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Maret 2022* (Juta US\$)	31
Gambar 17. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Januari-Maret 2022 (2018=100)	32
Gambar 18. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua Januari-Maret 2022 (2018=100)	33
Gambar 19. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	39
Gambar 20. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2020-2022* (Ton)	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Edisi April 2022

1. Inflasi

- Pada bulan Maret 2022, tiga gabungan kota IHK di Papua (Kota Jayapura, Timika dan Merauke) mengalami inflasi 1,00 persen.
- Inflasi Kalender gabungan 3 kota IHK di Papua pada Maret 2022 sebesar 0,58 persen.
- Inflasi Year on Year (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 1,96 persen.
- Seluruh Kota IHK di Papua mengalami inflasi seperti Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,90 persen, Merauke mengalami inflasi 1,86 persen dan Timika sebesar 0,63 persen.

2. Nilai Tukar Petani

- Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada Maret 2022 sebesar 101,13 atau mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan Februari 2022.
- Komponen Pembentuk NTP yaitu Indeks Harga Diterima Petani (It) sebesar 107,60 dan Indeks Harga Dibayar Petani (Ib) sebesar 106,39
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga Papua pada Maret 2022 sebesar 0,26 persen atau meningkat dibandingkan kondisi Februari 2022.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Papua sebesar 107,04.

3. Transportasi

a. Transportasi Laut

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Februari 2022 dengan moda angkutan laut sebanyak 6.016 orang. Secara kumulatif, penumpang yang berangkat pada Januari-Februari 2022 sebanyak 16.737 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Februari 2022 dengan moda transportasi angkutan laut sebanyak 7.450 orang. Secara kumulatif, penumpang yang datang pada Januari-Februari 2022 sebanyak 19.655 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Februari 2022 sebanyak 17.741 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Februari 2022 sebanyak 125.408 ton.

b. Transportasi Udara

- Data transportasi udara mencakup Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Mopah di Merauke dan Bandara Mozes Kilangin di Mimika.
- Jumlah penumpang yang berangkat pada Februari 2022 dengan moda angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 76.391 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Februari 2022 dengan moda transportasi angkutan udara dalam negeri di 3 bandara sebanyak 92.373 orang.

- Volume barang yang dimuat pada Februari 2022 sebanyak 10.254 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Februari 2022 sebanyak 1.415 ton.

4. Ekspor dan Impor

- Ekspor Papua pada Maret 2022 tercatat senilai US\$ 495,02 juta. Ekspor bulan ini hanya berupa ekspor non migas.
- Dilihat menurut ekspor golongan HS 2 digit, maka ekspor golongan Biji Tembaga dan Konsentrat (HS26) nilai ekspor mencapai US\$486,67 juta, menurun 18,33 persen dari bulan sebelumnya.
- Total ekspor yang ditujukan ke enam negara tujuan utama (Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India dan Filipina) nilai ekspornya mencapai US\$362,83 juta sedangkan ekspor yang dilakukan ke negara lain tercatat sebesar US\$164,13 juta.
- Ekspor ke Papua New Guinea pada Maret 2022 mencapai US\$ 0,42 juta.
- Impor Papua pada Maret 2022 sebesar US\$46,71 juta berupa impor migas senilai US\$28,30 juta dan impor nonmigas US\$18,41 juta.
- Impor 10 golongan nonmigas utama pada Maret 2022 tercatat senilai US\$14,82 juta.
- Nilai impor dari 7 negara utama pada Maret 2022 sebesar US\$44,86 juta.
- Neraca Perdagangan Papua pada Maret 2022 mengalami surplus sebesar US\$448,31 juta. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya.

5. Perkembangan Pariwisata Provinsi Papua Januari 2022

- TPK hotel bintang selama Februari 2022 mencapai 37,66 persen dengan jumlah tamu menginap sebanyak 15.645 orang.
- Rata-rata tamu menginap (RLTM) di hotel bintang pada Februari 2022 mencapai 1,92 hari atau naik 0,11 poin dibandingkan Januari 2022 sebesar 1,81 hari.
- TPK hotel nonbintang selama Februari 2022 mencapai 17,56 persen.
- Rata-rata tamu menginap (RLTM) hotel nonbintang sebesar 1,60 hari.

<https://papua.bps.go.id>



Penduduk

"Jumlah penduduk Papua September tahun 2020 mencapai 4,30 juta jiwa"

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".

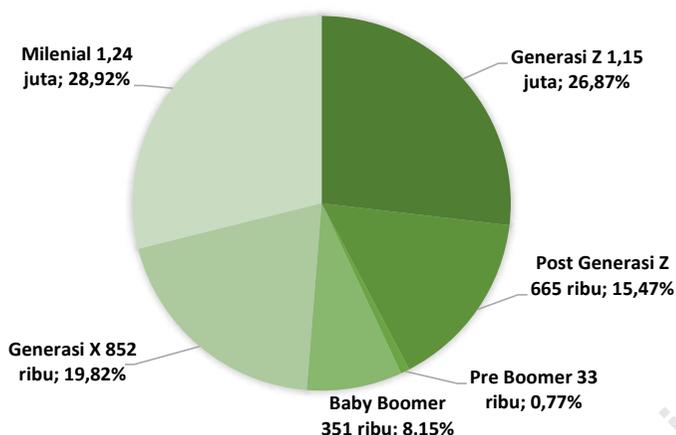
Secara khusus, tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan inovasi pada tata kelola SP2020, di antaranya menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada kegiatan pengumpulan data, diantaranya melalui penggunaan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)* dalam Sensus Penduduk (SP) Online, memanfaatkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai wilayah kerja statistik SP2020, menyesuaikan jangka waktu tinggal dalam konsep penduduk, dari minimal telah tinggal selama enam bulan menjadi minimal satu tahun, menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit pendataan dan menyusun proses bisnis pengumpulan data yang komprehensif

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1980-2020



* masih bergabung dengan Papua Barat

Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020



Post Generasi Z: lahir tahun 2013 dst.
 Generasi Z: lahir tahun 1997-2012
 Generasi X: lahir tahun 1965-1980
 Milenial: lahir tahun 1981-1996
 Baby Boomer: lahir tahun 1946-1964
 Pre-Boomer: lahir sebelum tahun 1945

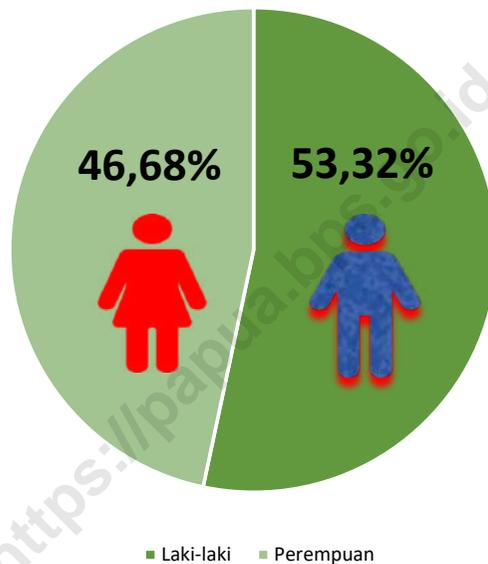
Adapun beberapa penyesuaian tata kelola terhadap pelaksanaan SP2020 diakibatkan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO, maka SPOnline yang semula di laksanakan pada tanggal 15 Februari s.d. 31 Maret 2020, kemudian diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Pendataan penduduk yang semula dilaksanakan pada Juli 2020 dimundurkan ke September 2020 dan Metode pendataan penduduk yang semula direncanakan secara wawancara dan wilayah dibagi menjadi 2 zona dengan mempertimbangkan ketersediaan akses internet, yaitu zona yang menggunakan kuesioner kertas (*paper and pencil interviewing*, PAPI) dan dan zona yang menggunakan elektronik (*computer assisted personal interviewing*, CAPI), akhirnya dibagi menjadi 3 zona, yaitu Zona 1 *Drop Off and Pick up* (DOPU) kuesioner PAPI, Zona 2 Non DOPU, dan Zona 3 Wawancara.

SP2020 mencatat penduduk Papua pada bulan September 2020 sebanyak 4,30 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak 2010, jumlah penduduk Papua bertambah sekitar 1,47 juta jiwa dengan laju pertumbuhan (2010-2020) sebesar 4,13 persen pertahun.

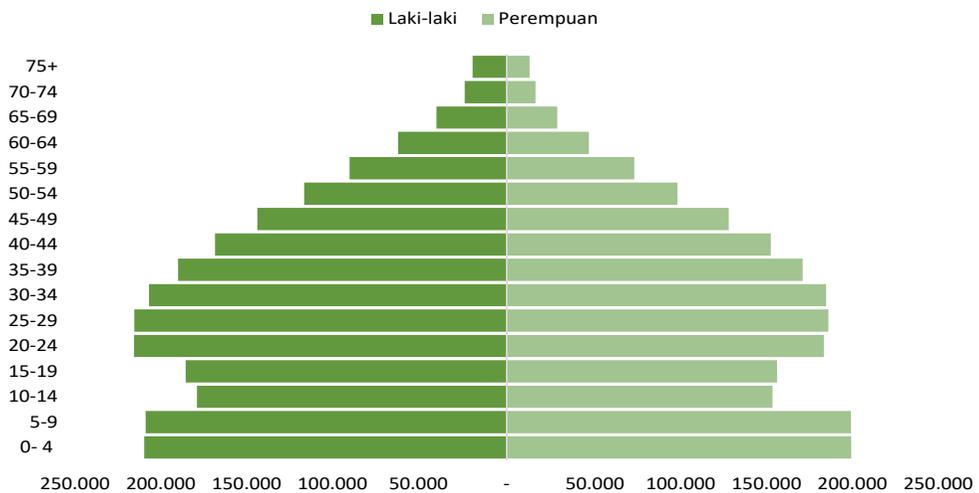
Berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari 4,30 juta jiwa sebesar 3,99 juta jiwa (92,83 persen) penduduk Papua berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sisanya sebesar 308 ribu jiwa (7,17 persen) adalah penduduk yang berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Dilihat dari penduduk menurut generasi, mayoritas penduduk Papua didominasi oleh Milenial dan Generasi Z dengan proporsi masing-masing sebesar 32,09 persen dan 30,38 persen. SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua sebanyak 2,29 juta jiwa atau 53,32 persen dari total penduduk. Sementara penduduk

perempuan sekitar 2 juta orang atau 46,68 persen dari total penduduk Papua. Maka, rasio jenis kelamin penduduk Papua sebesar 114, yang artinya terdapat 114 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Papua pada tahun 2020.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020 (persen)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2020 (orang)



Kemiskinan

"Persentase penduduk miskin Provinsi pada September 2021 sebesar 27,38 persen, naik 0,52 persen poin dibanding Maret 2021"

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada September 2021 mencapai 944,49 ribu orang. Dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin meningkat 24,05 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 32,36 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 27,38 persen, naik 0,52 persen poin terhadap Maret 2021 dan naik 0,58 persen poin terhadap September 2020.

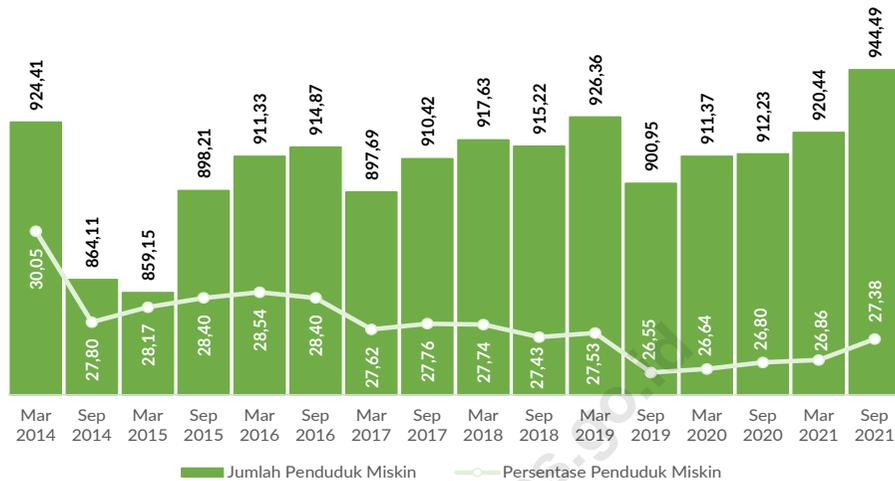
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,87 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 23,18 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik 0,03 persen poin dari 4,91 persen di Maret 2021 menjadi 4,94 persen pada September 2021. Begitu pula persentase kemiskinan di perdesaan, naik 0,79 persen poin dari 35,71 persen pada Maret 2021 menjadi 36,50 persen pada September 2021.

Pada September 2021, Provinsi Papua merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 27,38 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 4,56 persen. Secara nasional, persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,50 juta orang.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp 600.795,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,49 persen. Sementara jika dibandingkan September 2020, terjadi kenaikan sebesar 3,50 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari

Gambar 5. Penduduk Miskin Provinsi Papua Maret 2014–September 2021



Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2021 sumbangan GKM terhadap GK perkotaan sebesar 67,63 persen dan terhadap GK perdesaan sebesar 78,30 persen. Sedangkan GKNM terhadap GK perkotaan dan perdesaan masing-masing hanya menyumbang sebesar 32,37 persen dan 21,70 persen.

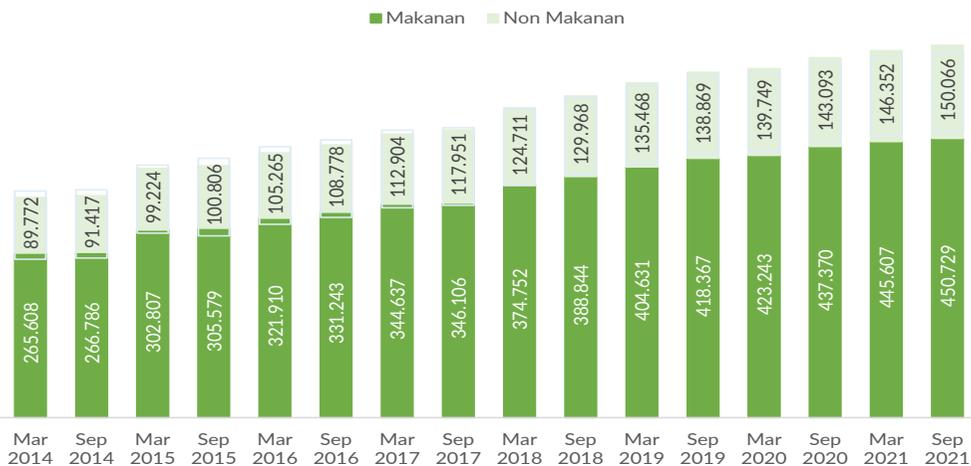
Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi Papua memiliki anggota rumah tangga sebanyak 4 hingga 5 orang (4,97 orang). Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 600.795,- maka rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2021 adalah sebesar Rp2.985.951,-/bulan naik sebesar 1,49 persen dibanding kondisi Maret 2021 yang sebesar Rp2.942.036,-/bulan.

Pada periode Maret 2021-September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 5,601 naik 0,713 menjadi 6,314 pada September 2021. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 1,689 menjadi 2,052.

**Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua
Maret 2014–September 2021 (rupiah)**

Periode (1)	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota (2)	Desa (3)	K+D (4)
Mar-14	404.944	338.206	355.380
Sep-14	408.419	340.846	358.204
Mar-15	440.697	388.095	402.031
Sep-15	445.057	392.446	406.385
Mar-16	466.985	412.991	427.176
Sep-16	479.294	425.264	440.021
Mar-17	498.368	441.287	457.541
Sep-17	508.403	446.994	464.056
Mar-18	542.542	482.000	499.643
Sep-18	566.903	499.615	518.811
Mar-19	588.744	520.117	540.099
Sep-19	603.458	538.088	557.236
Mar-20	611.115	542.695	562.992
Sep-20	622.346	562.412	580.463
Mar-21	634.703	573.510	591.959
Sep-21	643.071	582.157	600.795

**Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua
Maret 2014–September 2021 (rupiah)**



Ketimpangan

"Gini Ratio September 2021 tercatat sebesar 0,396"

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,396. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,395.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,307 naik dibanding *Gini Ratio* Maret 2021 yang sebesar 0,301, dan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,291. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,419, turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2021 yang sebesar 0,422 dan naik dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,416.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2021 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,94 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,80 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,51 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan sedang.

Gini Ratio jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi yaitu sebesar 0,436. Sementara *Gini Ratio* terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,247. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,381, terdapat tujuh provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,436), DKI Jakarta (0,411), Gorontalo (0,409), Jawa Barat (0,406), Papua (0,396), Sulawesi Tenggara (0,394) dan Nusa Tenggara Barat (0,384). Provinsi Papua baik pada periode Maret 2021 maupun September 2021, termasuk salah satu provinsi yang memiliki angka *Gini Ratio* lebih tinggi dari *Gini Ratio* nasional.

Indeks Demokrasi Indonesia

"IDI Provinsi Papua 2020 mencapai angka 64,54 yang berarti bahwa capaian kinerja demokrasi Indonesia pada kategori sedang"

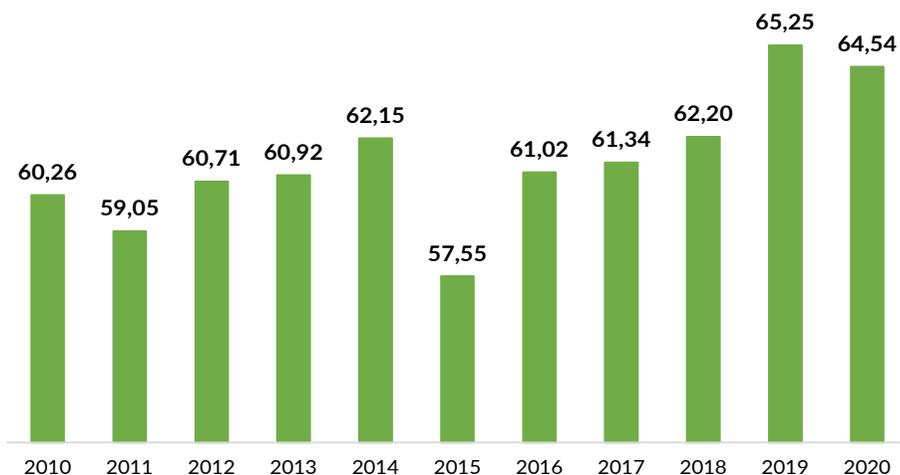
Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data diantaranya, *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (Perda, Pergub,dll), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.

IDI Provinsi Papua tahun 2020 adalah 64,54 turun 0,71 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 65,25. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua masih berada pada kategori 'sedang'.

IDI dari 2019–2020, aspek Kebebasan Sipil merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan sebesar 3,76 poin (dari 93,08 menjadi 89,32), sedangkan aspek Hak-hak Politik meningkat sebesar 0,67 poin (dari 51,16 menjadi 51,83) dan aspek Lembaga Demokrasi juga meningkat sebesar 0,93 poin (dari 52,61 menjadi 53,54).

Gambar 7. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020



Ketenagakerjaan

"Agustus 2021, TPAK Papua sebesar 78,29 persen dan TPT sebesar 3,33 persen"

Penduduk usia kerja di Papua berjumlah 2.494.142 orang pada Agustus 2021, naik sejumlah 80 orang dibandingkan Februari 2021 sebesar 2.494.062 orang. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK penduduk laki-laki pada Agustus 2021 lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, peningkatan TPAK perempuan pada Agustus 2021 dibandingkan Februari 2021 lebih tinggi sebesar 7,04 persen poin ke angka 69,10, sedangkan TPAK laki-laki hanya naik sebesar 2,83 persen poin ke angka 86,41.

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Papua pada Agustus 2021 sebanyak 1.887.781 orang, meningkat sekitar 124 ribu orang dibandingkan Februari 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Agustus 2021 sebesar 3,33 persen, turun 0,44 persen poin dibandingkan kondisi Februari 2021. TPT Papua juga lebih rendah dari TPT Indonesia yang berada di angka 6,49 persen. Pengangguran di perkotaan sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen poin menjadi 7,06 persen, sedangkan di perdesaan menurun hingga 0,62 persen poin menjadi 2,09 persen.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena COVID-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Total penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 171.995 orang, mengalami peningkatan sebanyak 53.794 orang atau sebesar 45,51 persen dibandingkan dengan Februari.

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja serta Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua

Status Keadaan Ketenagakerjaan (1)	Agustus 2020 (2)	Februari 2021 (3)	Agustus 2021 (4)
Penduduk Usia Kerja	2.449.145	2.494.062	2.494.142
Angkatan Kerja	1.767.403	1.832.278	1.952.777
Bekerja	1.691.745	1.763.180	1.887.781
Penganggur	75.658	69.098	64.996
Bukan Angkatan Kerja	681.742	661.784	541.365
TPT (%)	4,28	3,77	3,33
Laki-laki	4,79	4,56	3,75
Perempuan	3,56	2,58	2,74
TPAK (%)	72,16	73,47	78,29
Laki-laki	79,84	83,58	86,41
Perempuan	63,47	62,06	69,10
Komponen			
a. Pengangguran ¹ Karena COVID-19	-	1.694	2.466
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² Karena COVID-19	-	1.695	1.182
c. Sementara Tidak Bekerja ³ Karena COVID-19	-	631	8.796
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	-	114.181	159.551
Total	-	118.201	171.995

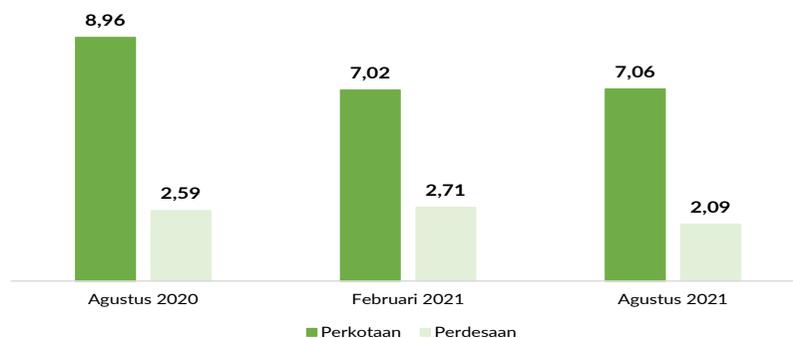
Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015

1. Pengangguran Karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020

3. Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja

Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah



Indeks Pembangunan Manusia

"IPM Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 60,62 dan status pembangunan berada di kategori sedang"

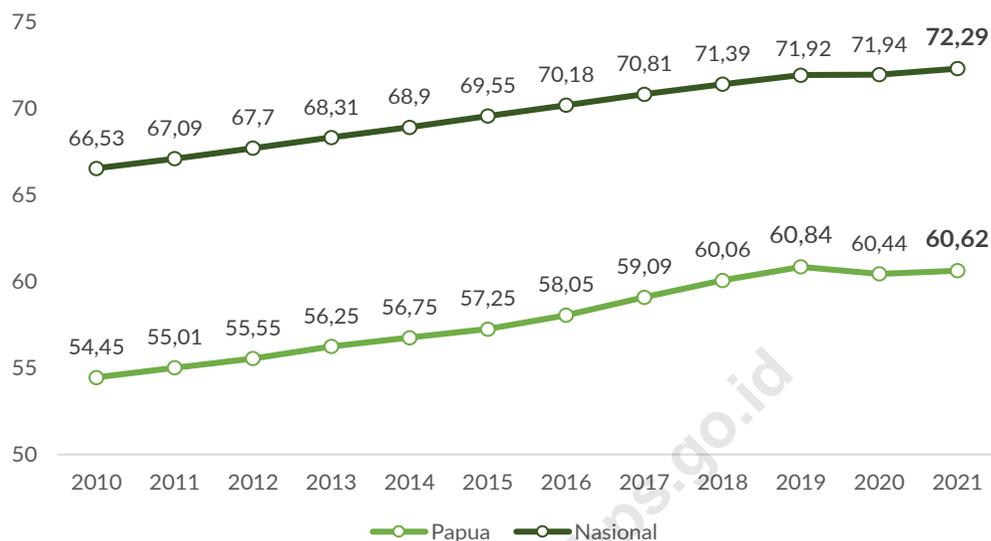
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people's choice). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Papua tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,30 persen menjadi 60,62. Setelah pada tahun 2020 yang lalu sempat turun -0,66 persen dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 60,44 pada tahun 2020. Peningkatan ini sejalan dengan IPM Indonesia yang juga meningkat pada tahun 2021 ini sebesar 0,49 persen menjadi 72,29.

Gambar 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010-2021



Peningkatan IPM Provinsi Papua tahun 2021 terjadi karena meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM Provinsi Papua tahun 2021. Pada periode 2020-2021, komponen Umur Harapan Hidup (UHH) naik 0,21 persen menjadi 65,93 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik 0,27 persen menjadi 11,11 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik 1,05 persen menjadi 6,76 tahun, dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 0,01 persen menjadi Rp 6,955 juta per tahun.

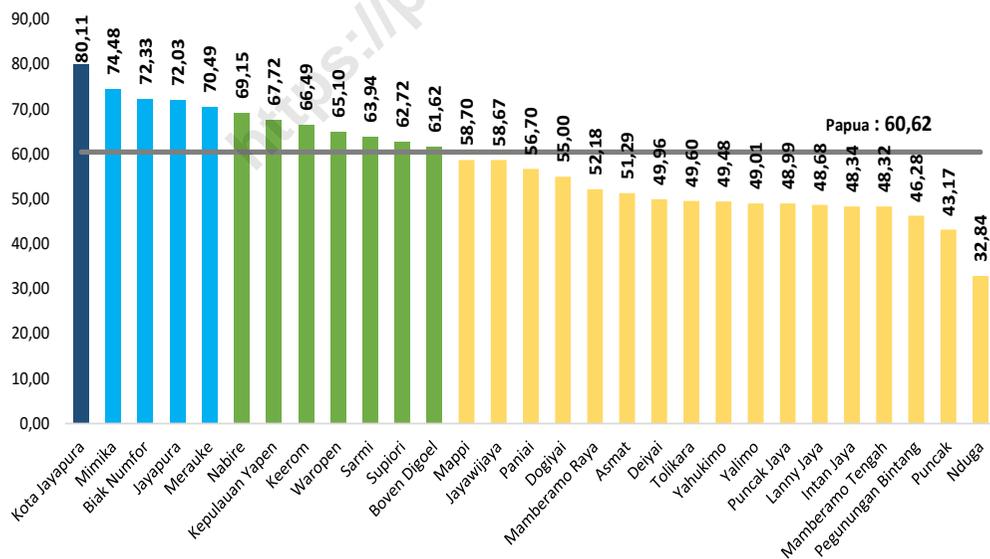
Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua juga mengalami peningkatan angka IPM pada tahun 2021. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang lalu dimana IPM pada hampir separuh kabupaten/kota di Papua menurun.

Pada tahun 2021, status IPM Kota Jayapura kembali meningkat menjadi “Sangat Tinggi”, setelah sempat turun pada tahun 2020 yang lalu. Capaian ini sekaligus menjadikan Kota Jayapura sebagai satu-satunya wilayah di Papua dengan status IPM sangat tinggi. Sementara, ada 4 kabupaten dengan status IPM “Tinggi” yaitu Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Merauke. Untuk kabupaten/kota dengan status IPM “Sedang” ada sebanyak 7 kabupaten yaitu Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Boven Digoel. Sementara itu, sebagian besar kabupaten status “Rendah” sebanyak 17 kabupaten yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Mamberamo Raya.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 32,84. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua.

Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Kabupaten Nduga (4,09 persen), Pegunungan Bintang (1,85 persen), dan Lanny Jaya (1,71 persen). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan paling kecil yaitu Kepulauan Yapen (0,09 persen), Keerom (0,14 persen) dan Boven Digoel (0,15 persen). Secara nasional, peningkatan IPM tercermin pada level provinsi. Selama periode 2020 hingga 2021, seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM. Provinsi dengan kemajuan pembangunan paling cepat yaitu: Provinsi Kalimantan Timur (0,84 persen), Kalimantan Utara (0,79 persen), dan Jawa Timur (0,60 persen). Sementara, provinsi yang mengalami peningkatan paling kecil yakni NTT (0,14 persen), Bali (0,25 persen) dan Papua Barat (0,26 persen).

Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2021



Indeks Kebahagiaan

"Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 69,87"

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Indeks kebahagiaan tahun 2021 diukur dengan tolok ukur tahun 2017. Penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator, yang tercakup dalam 3 (tiga) dimensi kehidupan, yaitu (1) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), (2) Dimensi Perasaan (*Affect*), dan (3) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Dimensi kepuasan hidup dibedakan menjadi subdimensi kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Sehingga, hasil indeks pada tahun 2021 ini memiliki keterbandingan dengan tahun 2017, namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2014, karena memiliki nilai kontribusi yang berbeda antar indikator.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 69,87, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 67,52. Jika dilihat dari masing-masing dimensi penyusunnya, Indeks Kepuasan Hidup tahun 2021 sebesar 73,23, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 71,07. Demikian juga dengan masing-masing subdimensinya, Subdimensi Kepuasan Hidup Personal tahun 2021 sebesar 68,95 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 65,98 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial tahun 2021 sebesar 77,50, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 76,16. Sedangkan pada Indeks Perasaan (*Affect*) tahun 2021 sebesar 63,72, justru lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 68,59. Demikian juga dengan Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) tahun 2021 sebesar 72,07, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 72,23. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2021

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
(1)	(2)	Personal	Sosial		(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	72,83	74,10	78,96	76,53	65,66	75,62
Perdesaan	68,72	66,95	76,92	71,94	62,97	70,69
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	69,47	67,83	76,85	72,34	64,00	71,56
Perempuan	70,43	71,39	78,90	75,15	63,13	73,19
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,72	70,28	76,58	73,43	61,21	73,73
Menikah	70,24	69,27	77,72	73,49	64,31	72,36
Cerai Hidup	66,84	66,77	75,66	71,21	58,71	69,82
Cerai Mati	68,32	67,11	76,82	71,97	62,00	70,37
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	68,56	66,47	77,09	71,78	62,60	70,73
25-40 Tahun	69,34	68,62	76,60	72,61	62,94	71,84
41-64 Tahun	70,35	69,29	78,13	73,71	64,50	72,26
≥ 65 Tahun	70,51	69,94	79,25	74,59	63,20	73,02
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	69,42	67,96	77,02	72,49	63,66	71,55
Pasangan KRT	71,77	73,11	79,51	76,31	63,97	74,25
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,69	67,18	74,83	71,01	60,70	70,71
2 Orang	69,25	69,43	77,25	73,34	62,38	71,36
3 Orang	69,36	67,89	77,12	72,51	63,79	71,26
4 Orang	70,59	69,65	77,32	73,48	64,95	72,78
5 Orang atau Lebih	70,57	69,38	78,70	74,04	64,25	72,82
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	66,15	62,38	75,25	68,82	61,23	67,92
Tidak tamat SD/ sederajat	70,68	68,03	79,23	73,63	66,19	71,78
SD sederajat	69,89	69,27	78,37	73,82	63,16	72,03
SMP sederajat	68,73	67,08	75,67	71,37	63,96	70,38
SMA sederajat	71,87	73,38	78,55	75,96	63,91	74,96
Diploma I, II, III	72,06	75,71	77,59	76,65	60,67	77,81
Diploma IV/S1	76,89	80,09	80,75	80,42	69,89	79,69
S2, S3	82,69	83,72	87,85	85,79	75,95	85,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	66,68	61,38	76,04	68,71	62,91	68,05
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	70,38	69,00	78,50	73,75	64,38	72,43
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,38	70,91	77,71	74,31	63,30	72,85
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	72,16	75,54	77,92	76,73	63,63	75,31
Lebih Dari Rp. 7.200.000	73,74	77,50	78,53	78,02	65,64	76,79
Papua	69,87	68,95	77,50	73,23	63,72	72,07

Potensi Desa (PODES)

"Tahun 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota"

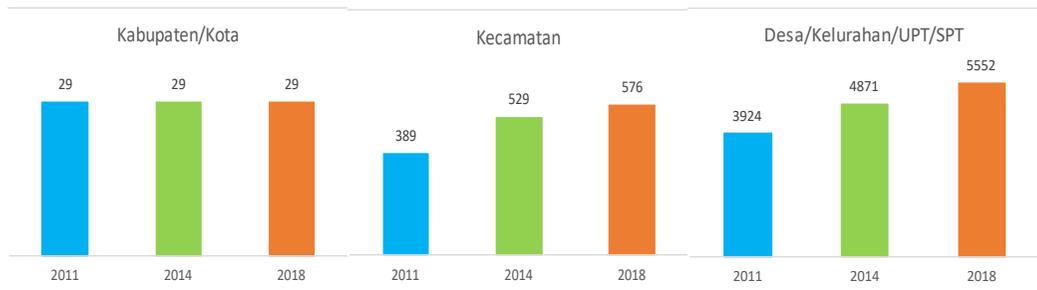
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/

Gambar 11. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018



kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

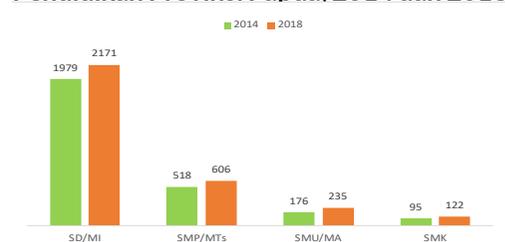
Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 13. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018



EKONOMI DAN PERDAGANGAN



Inflasi

"Maret 2022, inflasi Papua sebesar 1,00 persen"

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Maret 2022, terjadi inflasi sebesar 1,00 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,29 pada Februari 2022 menjadi 107,36 pada Maret 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2022 sebesar 0,58 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 1,46 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,49 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,77 persen; kesehatan sebesar 0,004 persen; transportasi sebesar 2,35 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,003 persen; pendidikan sebesar 0,10 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,04 persen; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,42 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Maret 2022, antara lain: cabai rawit, tarif angkutan udara, minyak goreng, bawang merah, dan buah pinang. Sementara beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: ikan cakalang, tomat, kangkung, ikan tongkol, dan ikan mumar.

Pada Maret 2022 dari 11 kelompok pengeluaran, 8 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, 2 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi, dan 1 kelompok tidak memberikan andil terhadap inflasi gabungan 3

Tabel. 4 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan *Year on Year* Gabungan 3 Kota IHK di Papua

No	Inflasi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maret	-0,92	0,66	1,00
2	Tahun Kalender (Januari-Maret)	0,09	0,91	0,58
3	Tahun ke Tahun (Maret tahun n terhadap Maret tahun n-1)	1,21	2,47	1,46

kota IHK di Provinsi Papua. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,56 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0001 persen; kelompok transportasi sebesar 0,26 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0002 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,004 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,002 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,001 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,01 persen. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak memberikan andil terhadap inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua.

Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

No	Kelompok	IHK Maret 2022	Inflasi Maret 2022 ⁽¹⁾	Andil Inflasi	Inflasi Year-on-Year ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	107,36	1,00	1,00	1,46
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	111,20	1,49	0,56	-0,57
2	Pakaian dan Alas Kaki	102,53	-0,03	-0,001	1,37
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,94	-0,07	-0,01	2,06
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,65	0,77	0,04	3,09
5	Kesehatan	109,41	0,004	0,0001	1,85
6	Transportasi	108,89	2,35	0,26	6,31
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,84	0,003	0,0002	0,24
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	106,15	0,00	0,00	1,40
9	Pendidikan	106,30	0,10	0,004	1,47
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	106,80	0,04	0,002	1,88
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	109,59	2,42	0,15	3,32

1) Persentase perubahan IHK Maret 2022 terhadap IHK Februari 2022

2) Persentase perubahan IHK Maret 2022 terhadap IHK Maret 2021

Produk Domestik Regional Bruto

"Pertumbuhan Ekonomi Papua tahun 2021 sebesar 15,11 persen"

Pada tahun 2021, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 235,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 158,61 triliun.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Selama tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,11 persen (c-to-c), meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 2,39 persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 40,80 persen, diikuti Real Estate sebesar 7,04 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,77 persen. Pertumbuhan produksi pada kategori pertambangan dan penggalian ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi bijih logam P.T Freeport selama tahun 2021. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 antara lain Industri Pengolahan sebesar -0,21 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,95 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar -4,64 persen.

Ekonomi Papua dengan Pertambangan dan Penggalian triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 17,16 persen, sedangkan tanpa Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 7,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan (-1,83%), Jasa Pendidikan (-4,92%) dan Jasa Kesehatan (-3,38%). Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan (37,68%); Pertambangan dan Penggalian (35,00%) dan Pengadaan Listrik dan Gas (13,42%).

Ekonomi Papua dengan Pertambangan dan Penggalian pada triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 7,22 persen, sedangkan tanpa Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 6,41 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang berkontraksi masing-masing sebesar -2,62 persen dan -3,94 persen. Sementara itu, tiga lapangan usaha

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB dengan Pertambahan dan Penggalian dan Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Kategori	Laju Pertumbuhan 2020*	Laju Pertumbuhan 2021**	Distribusi ADHB 2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,71	1,60	10,84
2	Pertambangan dan Penggalian	16,62	40,80	36,84
3	Industri Pengolahan	-5,02	-0,21	1,80
4	Konstruksi	-0,87	3,96	13,80
5	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,47	5,72	9,37
6	Transportasi dan Pergudangan	-32,10	3,66	3,84
7	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,19	-0,95	9,35
8	Lainnya	-0,61	2,24	14,16
	Total	2,39	15,11	100,00

Catatan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

yang mengalami pertumbuhan tertinggi antara lain Transportasi dan Pergudangan (35,15%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,29%) dan Konstruksi (8,66%). Pertumbuhan ketiga lapangan usaha tersebut didorong oleh aktivitas pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Papua.

Perekonomian Papua tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 36,84 persen; diikuti Konstruksi sebesar 13,80 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,84 persen.

Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan III-2018 - Triwulan IV-2021 (persen)



B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Papua tahun 2021 tumbuh sebesar 15,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran dan yang tertinggi pada Ekspor Luar Negeri sebesar 105,14 persen. Diikuti PMTB sebesar 18,53 persen; kemudian PK-LNPRT sebesar 4,95 persen; lalu komponen PK-P sebesar 3,61 persen; dan PK-RT sebesar 1,61persen. Sementara, Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang tumbuh 68,26 persen.

Struktur PDRB Papua tahun 2021 didominasi oleh dua komponen, yaitu PK-RT (44,24 persen) dan PMTB (35,38 persen). Sedangkan, Ekspor Luar Negeri memiliki distribusi sebesar 27,47 persen, dan diikuti PK-P sebesar 19,87 persen. Impor Luar Negeri memiliki distribusi sebesar 2,60 persen.

Ekonomi Papua pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh 17,16 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PMTB sebesar 24,28 persen. Diikuti oleh Ekspor Luar Negeri sebesar 21,22 persen, PK-LNPRT sebesar 11,69 persen, PK-P sebesar 10,72 persen, dan PK-RT sebesar 4,82 persen. Sedangkan Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 96,59 persen.

Ekonomi Papua triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 tumbuh sebesar 7,22 persen (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-P sebesar 32,30 persen; diikuti PK-RT sebesar 7,34 persen; dan PK-LNPRT sebesar 6,48 persen. Sementara, Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 11,54 persen. Komponen yang mengalami kontraksi adalah PMTB sebesar -9,22 persen dan Ekspor Luar Negeri sebesar -9,01 persen.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (persen)

No (1)	Kategori (2)	Laju Pertumbuhan 2020* (3)	Laju Pertumbuhan 2021** (4)	Distribusi ADHB 2021** (5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-5,58	1,61	44,24
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-7,54	4,95	2,04
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,06	3,61	19,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,50	18,53	35,38
5	Ekspor Luar Negeri	50,96	105,14	27,47
6	Impor Luar Negeri	-37,56	68,26	2,60

Catatan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Ekspor

"Maret 2022, ekspor Papua mencapai US\$495,02 juta"

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada Maret 2022 tercatat senilai US\$495,02 juta atau naik sebesar 16,17 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$426,10 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua pada bulan ini hanya berupa ekspor nonmigas senilai US\$495,02 juta. Ekspor terbesar bulan ini berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$486,67 juta atau dengan kata lain 97,94 persen dari total ekspor Papua. Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-Maret 2022 adalah senilai US\$1.553,49 juta atau meningkat 151,57 persen dibandingkan total ekspor Januari-Maret 2021 yang senilai US\$617,51 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Nilai ekspor golongan Bijih logam, terak, dan abu (HS26) pada Maret 2022 tercatat senilai US\$486,67 juta atau naik sebesar 18,33 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang senilai US\$411,30 juta. Ekspor golongan Bijih Logam, terak dan abu (HS26) berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Ekspor golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$7,93 juta. Ekspor golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) senilai US\$0,0007 juta yang dikirim langsung melalui Bandara Frans Kaisepo di Biak. Ekspor Non Migas Lainnya senilai US\$0,42 juta.

Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Maret 2022

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Mar 2022* thd Feb 2022	% Perubahan Jan-Mar 2022* thd Jan-Mar 2021	% Peran thd Total Impor Jan-Mar 2022*
	Feb 2022	Mar 2022*	Jan-Mar 2021	Jan-Mar 2022*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	426,10	495,02	617,51	1.553,49	16.17	151.57	100,00
Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	Undifined	Undifined	0,00
Non Migas	426,10	495,02	617,51	1.553,49	16.17	151.57	100,00

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

Nilai kumulatif ekspor golongan Bijih logam, terak, dan abu (HS26) pada periode Januari-Maret 2022 sebesar US\$1.521,49 juta. Nilai ini meningkat 153,02 persen apabila dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2021 yang sebesar US\$601,33 juta. Golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) memiliki nilai kumulatif Januari-Maret 2022 sebesar US\$31,56 juta. Nilai ini meningkat sebesar 167,99 persen apabila dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2021 yang sebesar US\$11,78 juta.

C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor ke enam negara utama pada Maret 2022 tercatat senilai US\$362,83 juta atau meningkat sebesar 38,50 persen dibanding Februari 2022 yang senilai US\$261,97 juta. Ekspor ke negara lainnya pada Maret 2022 senilai US\$132,19 juta, turun sebesar 19,46 persen dibanding bulan Februari 2022 senilai US\$164,13 juta. Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor adalah Malaysia dengan nilai ekspor senilai US\$128,88 juta, dimana komoditi yang diekspor berupa golongan Bijih logam, terak, dan abu (HS26). Sementara itu, ekspor ke negara tetangga Papua Nugini pada Maret 2022 senilai US\$0,42 juta.

Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama pada periode Januari-Maret 2022 senilai US\$1.085,03 juta mengalami peningkatan sebesar 99,57 persen bila dibandingkan ekspor ke enam negara utama pada Januari-Maret 2021 senilai US\$543,67 juta. Ekspor Papua ke negara lainnya juga mengalami peningkatan dari US\$73,84 juta pada Januari-Maret 2021 menjadi US\$468,46 juta pada Januari-Maret 2022. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 69,84 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-Maret 2022.

Gambar 15. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Maret 2022* (Juta US\$)



Ket:Tanda () menunjukkan Angka Sementara*

"Maret 2022, Impor Papua senilai US\$46,71 juta"

A. Impor Migas dan Non Migas

Impor Papua pada Maret 2022 tercatat senilai US\$46,71 juta berupa impor migas senilai US\$28,30 juta dan impor nonmigas senilai US\$18,41 juta. Dibandingkan Februari 2022, nilai impor Papua mengalami peningkatan sebesar 76,30 persen yang dipengaruhi oleh impor migas yang mengalami peningkatan sebesar 131,85 persen dan impor non migas yang turut meningkat sebesar 28,85 persen. Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) yang memiliki nilai US\$6,78 juta atau sebesar 45,77 persen dari total nilai impor komoditi non migas utama. Sedang impor migas meningkat senilai US\$16,09 juta.

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada Maret 2022 tercatat senilai US\$14,82 juta atau naik 36,87 persen bila dibandingkan Februari 2022 yang sebesar US\$10,83 juta. Golongan barang nonmigas utama dengan nilai impor terbesar adalah golongan Barang dari Besi dan Baja (HS73) sebesar US\$6,78 juta, Plastik dan Barang dari Plastik (HS39) senilai US\$2,61 juta, Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85) sebesar US\$1,65 juta, dan Karet dan barang dari karet (HS40) sebesar US\$1,59 juta. Untuk nilai impor golongan non migas lainnya mengalami peningkatan sebesar 3,71

Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Maret 2022

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Mar 2022* thd Feb 2022	% Perubahan Jan-Mar 2022* thd Jan-Mar 2021	% Peran thd Total Impor Jan-Mar 2022*
	Feb 2022	Mar 2022*	Jan-Mar 2021	Jan-Mar 2022*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	26,49	46,71	63,07	106,36	76,30	68,64	100,00
Migas	12,21	28,30	24,57	50,96	131,85	107,40	47,91
Non Migas	14,29	18,41	38,50	55,40	28,85	43,91	52,09

Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

persen yaitu dari US\$3,46 juta menjadi US\$3,58 juta.

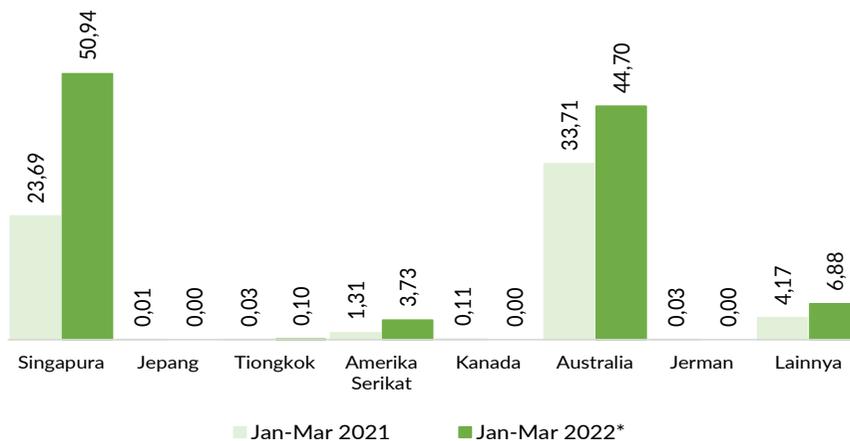
Secara kumulatif, total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-Maret 2022 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 46,37 persen, yaitu dari US\$31,81 juta menjadi US\$46,57 juta. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya nilai kumulatif impor golongan Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) tahun 2021-2022 sebesar US\$8,54 juta. Berbanding lurus dengan total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya juga naik sebesar 32,19 persen atau lebih tinggi US\$2,15 juta. Impor migas dan 10 Golongan nonmigas utama memberikan andil 91,69 persen terhadap total impor kumulatif Januari-Maret 2022.

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada Maret 2022 tercatat sebesar US\$44,86 juta atau naik 71,26 persen dibandingkan nilainya pada Februari 2022 sebesar US\$26,20 juta. Impor dari negara lainnya mengalami peningkatan sebesar US\$1,55 juta, menjadi US\$1,84 juta. Pada Maret 2022, terdapat Impor yang berasal dari Negara Tetangga Papua New Guinea sebesar US\$1,45 juta.

Total nilai impor kumulatif dari tujuh negara utama pada periode Januari-Maret 2022 adalah sebesar US\$99,47 juta atau lebih tinggi 68,90 persen bila dibandingkan dengan nilainya pada Januari-Maret 2021 yang sebesar US\$58,90 juta. Total nilai impor kumulatif dari negara lainnya pada periode Januari-Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar 65,06 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari US\$4,17 juta menjadi US\$6,88 juta.

Gambar 16. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Asal Maret 2022* (Juta US\$)



Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

Nilai Tukar Petani

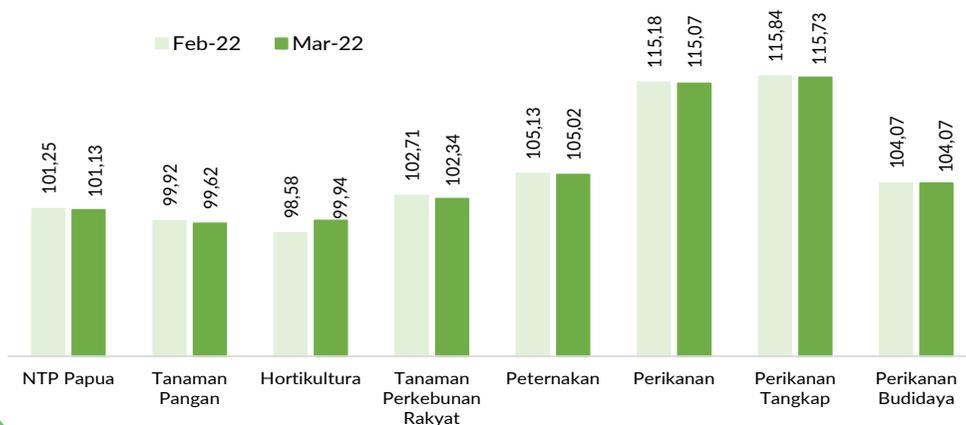
"Maret 2022, NTP Papua sebesar 101,13"

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Papua Maret 2022 tercatat turun 0,11 persen menjadi 101,13 dibandingkan NTP Februari 2022. Berdasarkan pemantauan harga perdesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan indeks NTP disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,11 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,22 persen. Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan turun 0,30 persen, subsektor hortikultura naik 1,39 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,36 persen, subsektor peternakan turun 0,11 persen, dan subsektor perikanan turun 0,09 persen.

Gambar 17. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Februari-Maret 2022 (2018=100)



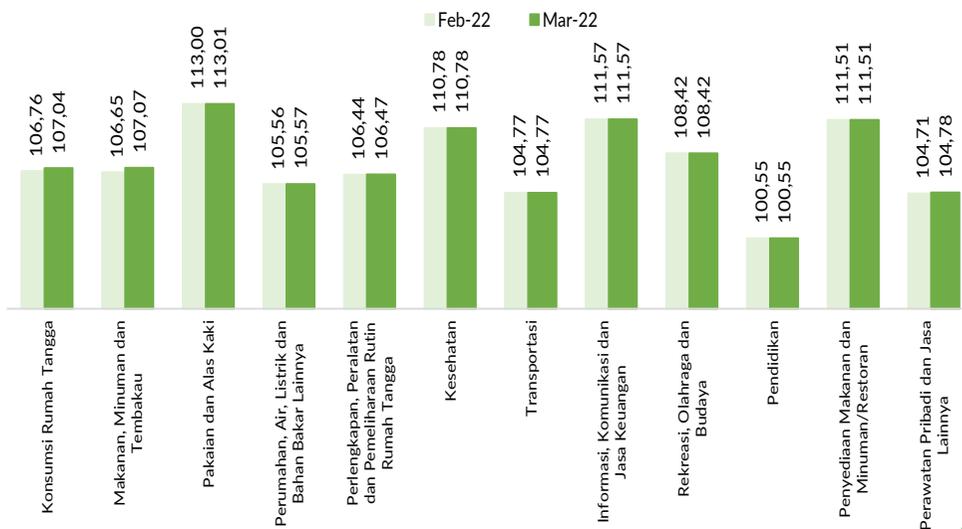
Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani. Pada Maret 2022, It Papua sebesar 107,60 atau naik 0,11 persen dibandingkan It Februari 2022. Kenaikan It disebabkan oleh perubahan indeks di beberapa sektor yaitu subsektor Hortikultura naik 1,62 persen, subsektor Peternakan naik 0,09 persen dan subsektor Perikanan naik 0,11 persen, sedangkan subsektor Tanaman Pangan turun 0,09 persen, subsektor Perkebunan Rakyat tidak mengalami perubahan angka indeks.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani (Ib). Pada Maret 2022, Ib Papua sebesar 106,39 atau naik 0,22 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya. Perubahan Ib gabungan tersebut didorong oleh kenaikan Ib pada semua subsektor pertanian yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,22 persen, subsektor Hortikultura sebesar 0,23 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,36 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,20 persen, dan subsektor Perikanan sebesar 0,20 persen.

B. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen nilai

Gambar 18. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Februari-Maret 2022 (2018=100)



yang dibayar oleh petani. Pada Maret 2022, terjadi peningkatan IKRT sebesar 0,26 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh naiknya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga.

Sejalan dengan IKRT Papua, IKRT nasional bulan Maret 2022 tercatat mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,70 persen. Dari 31 provinsi yang dihitung IKRT-nya pada Maret 2022, diketahui 31 provinsi yang mengalami kenaikan IKRT, sedangkan 3 provinsi lainnya mengalami penurunan IKRT. Provinsi Bangka Belitung tercatat mengalami kenaikan IKRT tertinggi pada Maret 2022 yaitu sebesar 1,54 persen. Sementara itu, penurunan IKRT terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 0,18 persen.

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Subsektor

NTUP Papua pada Maret 2022 adalah 103,97 atau naik sebesar 0,08 persen. Berdasarkan subsektor, tercatat subsektor Tanaman Pangan turun 0,12 persen, subsektor Hortikultura naik 1,62 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,02 persen, subsektor Peternakan naik 0,09 persen dan subsektor Perikanan naik 0,05 persen.

Tabel 10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Menurut Subsektor Provinsi Papua dan Persentasenya, Februari-Maret 2022 (2018=100)

Subsektor (1)	Februari 2022 (2)	Maret 2022 (3)	Perubahan (%) (4)
1. Tanaman Pangan	102,24	102,12	-0,12
2. Hortikultura	102,82	104,48	1,62
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	105,05	105,08	0,02
4. Peternakan	108,52	108,62	0,09
5. Perikanan	118,13	118,19	0,05
5.1 Perikanan Tangkap	118,78	118,83	0,04
5.2 Perikanan Budidaya	107,30	107,45	0,14
NTUP Gabungan	103,88	103,97	0,08

Angkutan Laut

"Februari 2022, penumpang berangkat (angkutan laut dalam negeri) sebanyak 6.016 orang"

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Sepanjang bulan Februari 2022 terjadi lonjakan kasus harian Covid-19 secara nasional dimana varian Omicron, menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Pada awal Februari 2022 ada 107 kasus harian di seluruh Papua dan melonjak hingga 1.000 kasus pada pertengahan bulan. Upaya intervensi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meredam lonjakan kasus tersebut dengan kembali menerapkan PPKM level 3 di 11 kabupaten/kota. Mobilitas masyarakat umum masih dapat dilakukan dengan dokumen sertifikat vaksin dan hasil tes Covid-19 PCR-swab atau antigen sebagai syarat utama. Hasil kebijakan tersebut terlihat dari melandainya kasus harian Covid-19 pada akhir bulan yang hanya 111 kasus. Dinamika ini turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan perjalanan, baik menggunakan angkutan laut maupun udara sepanjang Februari 2022.

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Februari 2022 tercatat sebanyak 6.016 orang atau turun 43,89 persendibanding Januari 2022 yang sebanyak 10.721 orang. Dilihat menurut pelabuhan, jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Jayapura tercatat sebanyak 5.197 orang dan penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Merauke sejumlah 819 orang.

Tabel 11. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang AngkutanLaut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2022

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jan'22 (Orang)	Feb'22 (Orang)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22	Jan'22 (Orang)	Feb'22 (Orang)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	9.430	5.197	-44,89	10.225	5.625	-44,99
Merauke	1.291	819	-36,56	1.980	1.825	-7,83
Total	10.721	6.016	-43,89	12.205	7.450	-38,96

Jumlah kumulatif embarkasi penumpang angkutan laut selama Januari-Februari 2022 sebanyak 7.450 orang atau naik 20,32 persen dibandingkan Januari-Februari 2021. Sedangkan arus debarkasi penumpang turun dari 18.204 orang pada Januari-Februari 2021 menjadi 15.850 orang pada Januari-Februari 2022.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Februari 2022 tercatat sebesar 17.741 ton atau turun 6,62persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 18.999 ton. Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura sebesar 11.087 ton atau naik 10,14 persen dibandingkan Januari 2022 sebesar 10.066 ton. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang sebesar 6.654 ton atau turun 25,51 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8.933 ton. Secara kumulatif, total volume barang yang dimuat pada Januari-Februari 2022 sebesar 36.740 ton, meningkat 46,97 persen dibandingkan dengan Januari-Februari 2021 sebesar 24.998 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura sebesar 5,91 persen dan di Pelabuhan Merauke sebesar 210,13 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Februari 2022 sebesar 125.408 ton atau naik 8,23 persen dibanding bulan sebelumnya sebesar 115.8760 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang sebesar 93.116 ton atau naik 17,62 persen dibandingkan Januari 2022 sebesar 79.170 ton. Di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang sebesar 32.292 ton atau turun 12,03 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Secara kumulatif volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke selama Januari-Februari 2022 sebesar 241.284 ton atau meningkat 15,58 persen bila dibandingkan Januari-Februari 2021 sebesar 208.753 ton.

Tabel 12. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Februari 2022

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jan'22 (Ton)	Feb'22 (Ton)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22	Jan'22 (Ton)	Feb'22 (Ton)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	79.170	93.116	17,62	10.066	11.087	10,14
Merauke	36.706	32.292	-12,03	8.933	6.654	-25,51
Total	115.876	125.408	8,23	18.999	17.741	-6,62

Angkutan Udara

"Februari 2022, penumpang berangkat (angkutan udara dalam negeri) sebanyak 76.391 orang"

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Februari 2022 tercatat sebanyak 76.391 orang atau turun 21,01 persen dibanding Januari 2022 yang sebanyak 96.705 orang. Dilihat menurut bandara, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Sentani di Jayapura tercatat sebanyak 46.482 orang, penumpang yang berangkat melalui Bandara Mopah di Merauke sejumlah 8.481 orang, dan jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Mozes Kilangin di Mimika sebanyak 21.428 orang.

Jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Februari 2022 tercatat sebanyak 92.373 orang atau turun 28,25 persen bila dibandingkan Januari 2022 yang sebanyak 128.751 orang. Jumlah penumpang yang datang pada Februari 2022 tercatat sebanyak 59.676 orang di Bandara Sentani, 8.997 orang di Bandara Mopah, dan 23.700 orang di Bandara Mozes Kilangin.

Tabel 13. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Februari 2022

Bandara	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jan'22 (Orang)	Feb'22 (Orang)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22	Jan'22 (Orang)	Feb'22 (Orang)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	56.981	46.482	-18,43	78.862	59.676	-24,33
Mopah	10.165	8.481	-16,57	12.132	8.997	-25,84
Mozes Kilangin	29.559	21.428	-27,51	37.757	23.700	-37,23
Total	96.705	76.391	-21,01	128.751	92.373	-28,25

Secara kumulatif, jumlah embarkasi penumpang angkutan udara selama Januari-Februari 2022 mencapai 173.096 orang atau meningkat 8,35 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang sebanyak 159.759 orang. Arus debarkasi penumpang angkutan udara selama Januari-Februari 2022 mengalami kenaikan sebesar 28,81 persen menjadi 221.124 orang jika dibandingkan Januari-Februari 2021 yang sebanyak 171.665 orang.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Februari 2022 tercatat sebesar 11.153 ton atau turun 16,89 persen dibandingkan Januari yang sebesar 13.420 ton. Di Bandara Sentani, volume muat barang pada Februari 2022 sebesar 9.917 ton atau turun 11,23 persen dibandingkan Januari 2022 sebesar 11.172 ton. Di Bandara Mopah, volume muat barang sebesar 78 ton atau naik 61,73 persen dibandingkan Januari yang sebesar 48 ton. Di Bandara Mozes Kilangin, volume muat barang sebesar 1.158 ton atau turun 47,36 persen dibandingkan Januari yang sebesar 2.199 ton.

Volume muat barang kumulatif Januari-Februari 2022 sebesar 24.573 ton, naik sebesar 24,68 persen bila dibandingkan dengan Januari-Februari 2021. Sementara itu, volume barang yang dibongkar pada Februari 2022 sebesar 1.522 ton atau turun 8,18 persen dibanding bulan Januari 2022. Di Bandara Sentani, volume bongkar barang pada Februari 2022 sebesar 1.061 ton atau turun 2 persen dibandingkan Januari 2022. Di Bandara Mopah, volume bongkar barang sebesar 100 ton atau turun 11,41 persen dibanding bulan sebelumnya. Di Bandara Mozes Kilangin, volume bongkar barang pada Februari 2022 sebesar 361 ton atau turun 21,89 persen dibandingkan Januari 2022.

Tabel 14. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Desember 2021

Bandara	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jan'22 (Ton)	Feb'22 (Ton)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22	Jan'22 (Ton)	Feb'22 (Ton)	% Perubahan Feb'22 thd Jan'22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	1.083	1.061	-2,00	11.172	9.917	-11,23
Mopah	113	100	-11,41	48	78	61,73
Mozes Kilangin	462	361	-21,89	2.199	1.158	-47,36
Total	1.657	1.522	-8,18	13.420	11.153	-16,89

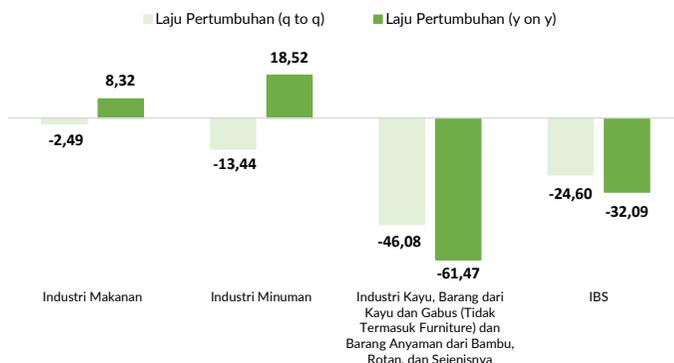
Industri Manufaktur

"Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2019 tumbuh negatif 24,60 persen"

A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,60 persen dari Triwulan III-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 0,09 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Produksi kayu mengalami penurunan drastis karena vakumnya salahs atu perusahaan kayu dengan skala besar di Papua sehingga mempengaruhi jumlah kayu yang dihasilkan. Selain itu, terkait pembatasan izin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga belum menemukan titik terang hingga saat ini. Kondisi yang sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Hal ini merupakan efek lanjutan dari kerusakan yang terjadi di Papua pada triwulan lalu. Selain itu banyak acara-acara akhir tahun yang tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi di beberapa tempat belum kondusif sepenuhnya, yang secara tidak langsung menyebabkan permintaan juga ikut menurun.

Gambar 19. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,09 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan IV-2019.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,36 persen dari Triwulan III-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh negatif sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi karena adanya perayaan Hari Raya Natal. Produksi barang galian bukan logam (KBLI 23), makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan share yang cukup besar mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,68 persen, 0,94 persen dan 5,20 persen dari Triwulan III-2019. Secara y-o-y, produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 ini mengalami pertumbuhan positif 10,53 persen dibandingkan Triwulan IV-2018.

Tabel 15. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q to q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	0,94	7,28
11	Industri Minuman	5,20	3,88
13	Industri Tekstil	2,06	-7,33
14	Industri Pakaian Jadi	14,42	1,47
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	22,58	5,63
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6,04	-5,74
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,25	-22,19
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-17,13	35,09
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-19,26	-32,98
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,68	5,82
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,50	4,94
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-55,40	25,98
31	Industri Furnitur	-1,37	-14,34
32	Industri Pengolahan Lainnya	61,21	33,34
33**	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-41,42	97,55

catatan:
**) Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi

Pola Distribusi Perdagangan

"Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Provinsi Papua tahun 2020 untuk komoditas beras 25,13 persen; telur ayam ras 18,13 persen; minyak goreng 37,26 persen; dan gula pasir 36,50 persen"

Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (Poldis) merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan MPPT dari produsen hingga konsumen akhir pada suatu wilayah. Data yang dikumpulkan merupakan data tahun 2020, dengan responden produsen dan pedagang yang tersebar di 354 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih di 34 provinsi.

Komoditas strategis dalam survei Poldis dipilih berdasarkan kriteria komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2020, komoditas yang terpilih adalah beras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) Provinsi Papua tahun 2020 untuk komoditas beras 25,13 persen; telur ayam ras 18,13 persen; minyak goreng 37,26 persen; dan gula pasir 36,50 persen.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) nasional pada tahun 2020 untuk komoditas beras 21,47 persen; telur ayam ras 20,19 persen; minyak goreng 17,41 persen; dan gula pasir 25,86 persen.

Tabel 16. Tabel Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2020

Komoditas (1)	Pola Distribusi Perdagangan (2)
Beras	Luar Provinsi -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Telur Ayam Ras	Produsen -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Minyak Goreng	Luar Provinsi -> Distributor -> Pedagang Grosir -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Gula Pasir	Luar Provinsi -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir

"Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Papua pada Februari 2022 mencapai 37,66 persen"

A. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Papua selama Februari 2022 mencapai 37,66 turun sebesar 1,88 poin dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 39,54 persen. Penurunan terjadi pada kelas bintang 3 yaitu sebesar 12,40 poin, sementara kelas bintang satu, bintang dua dan bintang empat meningkat sebesar 1,00 pada bintang satu, 12,16 pada bintang dua dan 4,80 pada bintang empat. Jika dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, TPK hotel bintang pada Februari 2022 naik 5,02 poin. Kenaikan TPK terjadi pada tiga kelas, sementara satu kelas mengalami penurunan. Bintang satu naik 7,97 poin, bintang dua naik 21,29 poin dan bintang empat naik 17,03 poin. Sementara pada bintang tiga turun 0,94.

B. Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM) Hotel Bintang

Rata-rata lama tamu menginap (RLTM) di hotel bintang selama Februari 2022 mencapai 1,92 hari, naik 0,11 poin dibanding Januari 2022 dan turun sebesar 0,46 poin dibanding bulan yang sama tahun 2021.

Tabel 17. TPK dan RLTM Hotel Bintang di Papua, Februari 2022

Uraian	TPK			RLTM		
	Jan 2022	Feb 2022*	Perubahan Feb 2022 thd Jan 2022 (poin)	Jan 2022	Feb 2022*	Perubahan Feb 2022 thd Jan 2022 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bintang 1	28,27	29,27	1,00	2,53	1,79	-0,74
Bintang 2	22,75	34,91	12,16	1,76	1,54	-0,22
Bintang 3	50,38	37,98	-12,40	1,83	2,04	0,21
Bintang 4	36,04	40,84	4,80	1,68	1,83	0,16
Total Bintang	39,54	37,66	-1,88	1,81	1,92	0,11

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

C. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi non bintang di Papua selama Februari 2022 mencapai 17,56 persen turun sebesar 16,49 poin dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 34,05 persen. Penurunan terjadi hampir disetiap kelas dimana kelas dua turun sebesar 10,78 poin, kelas tiga 2,42 poin dan kelas empat 22,80 poin. sementara kelas bintang satu, meningkat sebesar 21,64 poin. Jika dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, TPK hotel non bintang pada Februari 2022 turun 6,90 poin. Kenaikan TPK terjadi pada dua kelas, sementara dua kelas lainnya mengalami penurunan. Kelas satu naik 6,15 poin, kelas dua naik 2,01 poin. Sementara kelas tiga turun 18,39 poin dan kelas empat 9,23 poin.

D. Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM) Hotel Non Bintang

Rata-rata lama menginap tamu pada hotel klasifikasi non bintang di Papua pada bulan Februari 2022 mencapai 1,60 hari, turun 2,51 poin dibandingkan bulan Januari. Penurunan rata-rata lama tamu menginap hampir di semua kelas, dimana kelas satu turun 0,18 poin, kelas dua turun 0,58 poin dan kelas empat 2,97 poin. Sedangkan kelas tiga naik 0,16 poin.

Sementara itu, rata-rata lama tamu menginap (RLTM) di hotel non bintang dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021 turun sebesar 0,14 poin. Penurunan terjadi di kelas satu 0,75 poin, kelas dua 0,11 poin kelas tiga 0,26 poin, sementara kelas empat naik 0,35 poin.

Tabel 17. TPK dan RLTM Hotel Non Bintang di Papua, Februari 2022

Uraian	TPK			RLTM		
	Jan 2022	Feb 2022*	Perubahan Feb 2022 thd Jan 2022 (poin)	Jan 2022	Feb 2022*	Perubahan Feb 2022 thd Jan 2022 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelas 1	11,92	33,56	21,64	1,27	1,08	-0,18
Kelas 2	17,05	19,06	-10,78	2,19	1,61	-0,58
Kelas 3	34,11	15,72	-2,42	1,44	1,60	0,16
Kelas 4	24,14	14,91	-22,80	4,91	1,94	-2,97
Total Bintang	24,46	17,56	-16,49	4,11	1,60	-2,51

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

PERTANIAN



Tanaman Pangan

"Luas panen padi dan produksi padi pada tahun 2021 masing-masing sebesar 64.985 hektar dan 286.280 ton GKG"

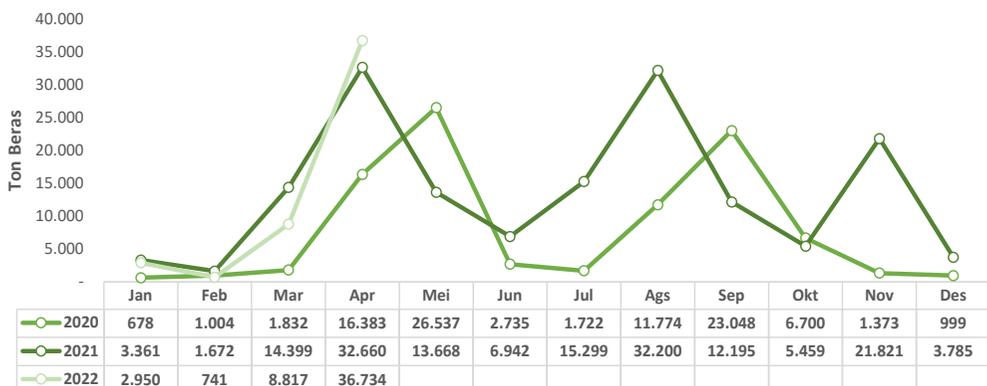
Penghitungan angka produksi padi tahun 2021 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan metode tersebut dapat dihitung luas panen dan potensi luas panen di Provinsi Papua.

Realisasi luas panen padi pada Januari-Desember 2021 sebesar 64.985 hektar atau naik 12.257 hektar (23,25 persen) dibandingkan 2020. Luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 1.911 hektar, dan potensi panen padi pada Februari-April 2022 diperkirakan 18.708 hektar. Total potensi pada Januari-April 2022 diperkirakan 19.899 hektar, turun 1.148 hektar (5,45 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Produksi padi sepanjang Januari-Desember 2021 mencapai 286.280 ton GKG, atau meningkat 120.278 ton GKG (72,46 persen) dibandingkan 2020. Sementara, potensi produksi sepanjang Oktober-Desember 2021 sebesar 18.219 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2021 terjadi pada bulan April sebesar 57.200 ton GKG dan terendah pada bulan Februari sebesar 2.928 ton GKG.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi dari Januari-Desember 2021 setara dengan 163.462 ton beras. Pada Januari 2022, produksi beras diperkirakan sebanyak 2.950 ton beras dan potensi pada Februari-April 2022 sebesar 46.293 ton. Sehingga, potensi produksi beras pada Januari-April 2022 mencapai 49.243 ton beras atau turun 2.849 (5,47 persen) dibandingkan tahun 2021.

Gambar 20. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2020-2022* (Ton)



Keterangan: * Produksi beras Januari-April 2022 adalah angka sementara



PENJELASAN
TEKNIS

Penjelasan Teknis

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Semarang sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2021 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 207,11. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 478,12. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kota Jayapura dengan nilai IKK sebesar 120,57.

B. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.

Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

C. Nilai Tukar Petani (NTP)

Mulai Januari 2020, penghitungan NTP menggunakan indeks harga dengan tahun dasar baru yakni 2018=100 baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Perubahan paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan NTP dengan indeks harga 2018=100 didasarkan pada hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) yang dilaksanakan oleh BPS. Hasil SPDT-NTP 2017 ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola produksi, pola biaya produksi dan pola konsumsi rumah tangga petani dibandingkan dengan hasil SPDT-NTP periode sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Secara nasional, penghitungan NTP dengan tahun dasar baru mencakup 34 provinsi sedangkan pada tahun dasar sebelumnya mencakup 33 provinsi.

Perubahan mendasar lainnya terjadi pada pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh rumah tangga petani. Perkembangan harga konsumsi rumah tangga yang meliputi berbagai barang dan jasa dari waktu ke waktu tercermin melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IKRT yang dihitung dengan tahun dasar baru 2018=100 menggunakan klasifikasi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan modifikasi *Classification of Individual Consumption According to Purpose* 2018 (COICOP 2018). COICOP 2018 merupakan referensi internasional untuk klasifikasi pengeluaran rumah tangga. Pengklasifikasian

pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan COICOP 2018 terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Pengeluaran. Sementara itu, pada tahun dasar sebelumnya yakni 2012=100, pengklasifikasian rumah tangga didasarkan pada 7 (tujuh) Kelompok Pengeluaran berdasarkan modifikasi COICOP 1999.

D. Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.

E. Tingkat Penghunian Kamar

Tingkat Penghunian Kamar (*Room Occupancy Rate*) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang dihuni (*Room Night Occupied*) dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (*Room Night Available*). TPK mengindikasikan berapa persentase kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia.

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi. Rata-rata lama menginap mengindikasikan berapa lama tamu yang datang dan menginap di suatu hotel/akomodasi, dalam satuan hari.

Lampiran



LAMPIRAN 1

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2017 – 2021

Jenis Indikator (1)		2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Kependudukan dan Kemiskinan	Indikator Sosial					
	Jumlah penduduk (jiwa)	3.265.444 ¹	3.322.526 ¹	3.379.302 ¹	4.303.707 ²	4.355.445 ⁴
	IPM	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62
	1. AHH saat lahir (tahun)	65,14	65,36	65,65	65,79	65,93
	2. Harapan lama sekolah (tahun)	10,54	10,83	11,05	11,08	11,11
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,27	6,52	6,65	6,69	6,76
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.996	7.159	7.336	6.954	6.955
	Angkatan kerja (jiwa)					
	Februari	1.753.858	1.851.486	1.808.848	1.837.805	1.832.278
	Agustus	1.762.841	1.835.963	1.842.203	1.767.403	1.952.777
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	Februari	77,30	79,38	76,04	75,01	73,47 ³
	Agustus	76,94	79,11 ³	76,92 ³	72,16 ³	78,29 ³
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	Februari	3,96	2,91	3,42	3,42	3,77 ³
	Agustus	3,62	3,20 ³	3,65 ³	4,28 ³	3,33 ³
	Persentase penduduk miskin (persen)					
	Maret	27,62	27,74	27,53	26,64	26,86
	September	27,76	27,43	26,55	26,80	27,38
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
	Maret	457.541	499.463	540.099	562.992	591.959
	September	464.056	518.811	557.236	580.463	600.795
	Distribusi pendapatan					
	Maret					
	40 % berpendapatan rendah	14,71	15,55	15,35	15,62	15,74
	40 % berpendapatan sedang	41,13	41,03	40,10	39,73	38,43
	20 % berpendapatan tinggi	44,16	43,42	44,55	44,66	45,82
	September					
	40 % berpendapatan rendah	15,18	14,77	15,74	15,72	15,94
	40 % berpendapatan sedang	39,97	40,67	39,34	39,48	38,06
	20 % berpendapatan tinggi	44,85	44,57	44,92	44,80	45,99
	Gini Ratio					
Maret	0,397	0,384	0,394	0,392	0,397	
September	0,398	0,398	0,391	0,395	0,396	

Keterangan:

¹ Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010

² Angka Hasil Sensus Penduduk (SP) September 2020

³ Perhitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

⁴ Angka Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2017 - 2021 (lanjutan)

Jenis Indikator (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)
Indikator Ekonomi					
Perkembangan Ekonomi					
Ekspor-Import					
Ekspor (Juta US\$) <i>Januari-Desember</i>	2.454,59	3.856,46	1.209,74	1.917,37	4.439,75
Import (Juta US\$) <i>Januari-Desember</i>	446,51	521,87	355,33	199,46	383,59
Neraca Perdagangan (Juta US\$) <i>Januari-Desember</i>	2.008,08	3.334,5	854,41	1.717,91	4.056,16
Inflasi					
Inflasi Kota Jayapura	2,41	6,70	0,66	1,77	1,38
Inflasi Kabupaten Merauke	1,25	5,42	0,86	3,36	0,36
Inflasi Kabupaten Timika	-	-	-	1,13	1,65
Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
Dengan Tambang (Persen)	4,64	7,32	-15,75	2,32	15,11
Tanpa Tambang (Persen)	5,17	5,14	4,98	-3,51	2,49
PDRB Berlaku					
Dengan Tambang (miliar Rp)	188.938,08	210.600,57	189.510,70	199.232,88	235.343,25
Tanpa Tambang (miliar Rp)	122.457,68	133.440,14	144.868,89	142.987,41	148.652,16
PDRB Harga Konstan					
Dengan Tambang (miliar Rp)	148.818,29	159.711,85	134.565,89	137.787,29	158.611,04
Tanpa Tambang (miliar Rp)	86.644,23	91.100,68	95.640,84	92.392,10	94.965,59

LAMPIRAN 2

Indikator Strategis Provinsi Papua Tahun 2022

Jenis Indikator	Satuan	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun'	Jul'	Agt'	Sep'	Okt'	Nov'	Des'
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perkembangan Ekonomi													
Ekonomi													
Ekspor	Juta US\$	632,36	426,10	495,02									
Impor	Juta US\$	33,16	26,49	46,71									
Neraca Perdagangan	Juta US\$	599,21	399,61	448,31									
Inflasi													
Inflasi Gabungan	Persen	0,03	-0,44	1,00									
Inflasi Kota Jayapura	Persen	-0,04	-0,78	0,90									
Inflasi Kabupaten Merauke	Persen	0,88	0,35	1,86									
Inflasi Kabupaten Timika	Persen	-0,42	-0,24	0,63									
Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y)			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
Dengan Tambang	Persen		-		-		-		-			-	
Tanpa Tambang	Persen												
PDRB ADHB													
Dengan Tambang	Miliar Rp		-		-		-		-			-	
Tanpa Tambang	Miliar Rp		-		-		-		-			-	
Industri Manufaktur Besar dan Sedang	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010, dan 2020

No.	Kabupaten/Kota	1990	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	243.722	318.350	195.716	230.932
2	Jayawijaya	355.562	417.326	196.085	269.553
3	Jayapura	246.467	167.227	111.943	166.171
4	Nabire	-	125.754	129.893	169.136
5	Kepulauan Yapen	70.333	81.593	82.951	112.676
6	Biak Numfor	90.843	111.092	126.798	134.650
7	Paniai	223.337	97.726	153.432	220.410
8	Puncak Jaya	-	79.356	101.148	224.527
9	Mimika	-	89.861	182.001	311.969
10	Boven Digoel	-	-	55.784	64.285
11	Mappi	-	-	81.658	108.295
12	Asmat	-	-	76.577	110.105
13	Yahukimo	-	-	164.512	350.880
14	Pegunungan Bintang	-	-	65.434	77.872
15	Tolikara	-	-	114.427	236.986
16	Sarmi	-	-	32.971	41.515
17	Keerom	-	-	48.536	61.623
18	Waropen	-	-	24.639	33.943
19	Supiori	-	-	15.874	22.547
20	Mamberamo Raya	-	-	18.365	36.483
21	Nduga	-	-	79.053	106.533
22	Lanny Jaya	-	-	148.522	196.399
23	Mamberamo Tengah	-	-	39.537	50.685
24	Yalimo	-	-	50.763	101.973
25	Puncak	-	-	93.218	114.741
26	Dogiyai	-	-	84.230	116.206
27	Intan Jaya	-	-	40.490	135.043
28	Deiyai	-	-	62.119	99.091
29	Kota Jayapura	-	174.138	256.705	398.478
	Provinsi Papua	1.230.264	1.662.423	2.833.381	4.303.707

LAMPIRAN 4

Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2017-2021

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)
1	Merauke	168,31	156,56	153,05	150,93	148,88
2	Jayawijaya	290,37	311,96	304,65	295,03	288,05
3	Jayapura	137,54	125,98	123,98	120,87	121,79
4	Nabire	147,53	150,45	148,12	138,70	131,74
5	Kepulauan Yapen	144,96	142,25	149,24	142,53	136,06
6	Biak Numfor	142,21	134,88	132,35	129,53	125,74
7	Paniai	225,31	250,29	241,21	229,51	235,44
8	Puncak Jaya	436,94	464,12	459,89	449,51	446,40
9	Mimika	148,00	150,54	133,19	125,93	131,79
10	Boven Digoel	171,29	161,96	162,63	159,84	157,75
11	Mappi	180,53	167,70	152,24	152,02	155,91
12	Asmat	231,32	213,94	202,28	179,68	169,93
13	Yahukimo	242,78	220,02	205,60	192,81	181,94
14	Pegunungan Bintang	391,44	368,02	364,25	356,01	360,05
15	Tolikara	351,23	377,27	360,48	336,37	340,56
16	Sarmi	188,91	163,77	145,09	138,83	139,46
17	Keerom	160,94	147,62	141,98	134,14	127,56
18	Waropen	163,01	186,5	171,32	143,22	148,22
19	Supiori	150,79	149,02	138,44	130,43	139,26
20	Mamberamo Raya	192,76	208,29	193,19	184,27	171,96
21	Nduga	318,34	325,36	307,41	297,45	294,92
22	Lanny Jaya	332,92	337,65	333,55	317,27	320,10
23	Mamberamo Tengah	403,74	429,33	422,66	391,82	373,08
24	Yalimo	343,90	370,50	362,18	349,27	333,99
25	Puncak	469,96	498,98	493,31	492,62	478,12
26	Dogiyai	209,49	236,53	224,53	213,51	212,94
27	Intan Jaya	412,52	441,38	439,11	438,39	447,97
28	Deiyai	229,29	253,83	238,89	229,01	238,23
29	Kota Jayapura	147,06	132,86	121,49	120,20	120,57
	Provinsi Papua	229,82	227,90	218,59	208,90	207,11

LAMPIRAN 5

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	68,09	68,64	69,38	69,98	70,09	70,49
2	Jayawijaya	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03	58,67
3	Jayapura	70,50	70,97	71,25	71,84	71,69	72,03
4	Nabire	66,64	67,11	67,70	68,53	68,83	69,15
5	Kepulauan Yapen	65,55	66,07	67,00	67,76	67,66	67,72
6	Biak Numfor	71,13	71,56	71,96	72,57	72,19	72,33
7	Paniai	54,34	54,91	55,83	56,58	56,31	56,70
8	Puncak Jaya	45,49	46,57	47,39	48,33	48,37	48,99
9	Mimika	71,64	72,42	73,15	74,13	74,19	74,48
10	Boven Digoel	59,35	60,14	60,83	61,51	61,53	61,62
11	Mappi	56,54	57,10	57,72	58,30	58,15	58,70
12	Asmat	47,31	48,49	49,37	50,37	50,55	51,29
13	Yahukimo	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37	49,48
14	Pegunungan Bintang	41,90	43,24	44,22	45,21	45,44	46,28
15	Tolikara	47,11	47,89	48,85	49,68	49,50	49,60
16	Sarmi	61,27	62,31	63,00	63,45	63,63	63,94
17	Keerom	64,10	64,99	65,75	66,59	66,40	66,49
18	Waropen	63,10	64,08	64,80	65,34	64,94	65,10
19	Supiori	60,59	61,23	61,84	62,30	62,30	62,72
20	Mamberamo Raya	49,00	50,25	51,24	52,20	51,78	52,18
21	Nduga	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55	32,84
22	Lanny Jaya	45,16	46,49	47,34	48,00	47,86	48,68
23	Mamberamo Tengah	44,15	45,50	46,41	47,23	47,57	48,32
24	Yalimo	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34	49,01
25	Puncak	39,96	41,06	41,81	42,70	43,04	43,17
26	Dogiyai	53,32	54,04	54,44	55,41	54,84	55,00
27	Intan Jaya	44,82	45,68	46,55	47,51	47,79	48,34
28	Deiyai	48,50	49,07	49,55	50,11	49,46	49,96
29	Kota Jayapura	78,56	79,23	79,58	80,16	79,94	80,11
	Provinsi Papua	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62

LAMPIRAN 6

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	57.658.155,57	64.403.705,24	69.837.667,20	69.436.786,14	72.212.040,16
2	Jayawijaya	31.966.401,39	35.415.271,07	39.700.463,44	30.788.381,24	30.938.734,89
3	Jayapura	102.331.005,50	113.007.943,27	129.642.018,09	97.006.091,86	101.958.871,24
4	Nabire	65.361.352,34	69.908.072,16	76.260.397,88	66.344.812,06	70.472.244,67
5	Kepulauan Yapen	38.005.195,82	40.114.737,62	44.082.023,31	36.982.620,41	39.273.241,30
6	Biak Numfor	34.499.144,50	34.930.879,39	37.553.701,11	38.802.783,39	40.638.141,22
7	Paniai	20.741.036,90	22.462.852,42	24.702.408,02	19.502.416,66	19.898.843,12
8	Puncak Jaya	9.766.576,66	10.316.102,78	11.249.978,21	6.200.316,99	6.181.100,82
9	Mimika	352.769.406,16	395.993.721,40	256.580.274,85	203.921.934,66	301.074.096,01
10	Boven Digoel	64.411.696,37	67.435.795,70	71.091.624,73	75.073.194,41	76.483.158,75
11	Mappi	25.654.125,49	26.852.997,93	30.027.848,06	27.734.395,73	28.292.736,94
12	Asmat	21.938.123,87	23.626.517,20	25.428.215,11	23.414.884,32	24.138.547,28
13	Yahukimo	10.956.991,82	11.803.069,86	12.642.053,26	7.162.301,03	7.381.777,81
14	Pegunungan Bintang	22.051.088,02	23.700.771,49	25.392.900,76	25.284.199,00	26.600.407,13
15	Tolikara	9.861.303,81	10.627.506,78	11.155.789,30	7.081.554,59	7.160.754,67
16	Sarmi	59.990.021,67	64.315.850,93	71.940.091,41	70.895.706,96	74.387.631,14
17	Keerom	46.182.136	48.422.111,60	50.228.997,38	47.536.391,07	49.401.151,12
18	Waropen	59.792.941,40	62.601.875,94	65.619.884,44	60.452.963,04	61.523.994,73
19	Supiori	46.754.638,83	47.294.857,83	50.590.648,15	46.379.140,67	47.565.472,69
20	Mamberamo Raya	59.778.066,95	63.708.877,65	70.012.180,75	47.382.213,53	49.624.541,45
21	Nduga	10.504.868,10	11.469.337,55	11.514.547,95	11.959.263,84	12.469.533,00
22	Lanny Jaya	8.661.891,10	9.435.175,66	9.597.930,98	9.854.242,86	10.172.090,31
23	Mamberamo Tengah	20.823.205,72	22.468.981,84	22.674.400,92	23.989.826,36	24.662.389,60
24	Yalimo	16.559.570,23	18.254.273,14	18.893.314,53	12.632.867,57	13.100.379,38
25	Puncak	10.667.499,68	11.569.147,43	12.743.460,64	12.544.717,96	13.104.809,85
26	Dogiyai	11.566.519,52	12.503.498,16	13.572.193,50	11.706.990,65	11.982.543,33
27	Intan Jaya	22.489.277,23	24.251.939,80	25.162.395,87	9.460.171,19	9.520.899,48
28	Deiyai	16.028.574,07	17.484.748,86	18.752.354,62	14.539.553,12	14.859.765,39
29	Kota Jayapura	95.737.108,34	102.166.321,11	108.043.849,90	80.670.439,12	82.176.499,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

<https://papua.bps.go.id>

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp. (0967) 5165 999, 5165 107
Email: bps9400@bps.go.id



9 772477 447008